

AKU DATANG BUKANNYA MEMBAWA DAMAI, MELAINKAN PERTENTANGAN (LUK 12:51)

Sebuah Usaha Melihat Sejarah Gereja
dari Sudut Perutusan Yesus

FL. HASTO ROSARIYANTO, SJ

ABSTRAK

Sejarah kehadiran Gereja Katolik di wilayah Republik Indonesia memperlihatkan: Gereja mulai hidup di kawasan Nusantara, bukan karena kebetulan, juga bukan bagaikan hasil samping kolonisasi; jemaat-jemaat kristiani mulai tumbuh, karena orang kristiani bermaksud dan berusaha untuk memberi kesaksian akan Injil. Maka, pertumbuhan Gereja Katolik di Indonesia ini harus dinilai dari sudut perutusan Yesus: sejauh mana kesaksian hidup gereja membuat injil Yesus berarti dalam lingkungan hidup manusia?

Selama seratus lima puluh tahun Gereja Katolik hadir di kawasan Indonesia, usaha pendidikan mewujudkan keprihatinan injili itu; apakah situasi baru menuntut perwujudan yang diperbarui? Bagaimana, kalau kini umat Katolik makin tampil dalam sosok para awam, kalau gereja makin menemukan diri sebagai kelompok kecil di antara banyak agama lain yang besar, di tengah-tengah masyarakat mobil, dengan banyak pengungsi dan dengan kemiskinan yang makin menonjol? Manakah kesaksian yang membuat kabar gembira plausibel bagi manusia dewasa ini? Kesaksian yang diperbarui menuntut keberanian untuk bertentangan.

Pengantar

Banyak peristiwa yang pada mulanya kelihatan terjadi sebagai suatu kebetulan. Dalam terang iman, peristiwa yang satu seakan disiapkan untuk menyongsong peristiwa berikut. Sejarah Gereja Katolik

di Indonesia berkembang menjadi seperti adanya sekarang juga lewat peristiwa yang seakan kebetulan, meski tidak seluruhnya. Keputusan Provinsial Yesuit Belanda mengutus Pater Martinus van den Elzen sebagai Yesuit pertama yang berkarya di Indonesia jelas bukanlah suatu kebetulan melainkan menyiratkan sebuah misi yang harus diemban. Begitu pula sewaktu Pater van Lith, Hoevenaars, dan Engbers dikirim untuk memulai misi di Jawa, itu bukan suatu kebetulan. Demi *missio javanica*, menurut kesaksian Pater J. Keijzer, Belanda rela melepas tunas-tunas muda terbaik.

Gereja Katolik di Indonesia, dan Keuskupan Agung Semarang khususnya, akan selalu mengenang Pater van Lith dengan penuh syukur. Merunut ke periode awal perjuangan Pater van Lith, masa-masa itu bukanlah periode yang mudah. Sebuah prioritas pilihan harus diambil, dan untuk itu terkadang harus mengalami pertentangan. Para perintis karya misi di Indonesia berani membongkar rasa damai palsu. Gereja harus dibangun dengan fondasi batu karang, juga kalau harus berhadapan dengan pertentangan dan konflik.

Memperhatikan perjalanan sejarah Gereja Katolik di Indonesia dari waktu ke waktu, ada saat hubungan Gereja-Pemerintah tampak begitu harmoni, damai. Di kesempatan lain, muncul ketegangan. Ada satu harapan: semoga Gereja tidak mengorbankan tugas perutusannya hanya demi menghindari pertentangan.

Situasi Awal

Pada tahun 1808, sewaktu Prefektur Batavia didirikan, Takhta Suci menyatakan bahwa wilayah Prefektur Batavia itu meliputi daerah kekuasaan Hindia Belanda.¹ Secara kasar bisa dikatakan bahwa seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia sekarang ini berada di dalam satu wilayah keuskupan. Dan lagi, wilayah seluas itu pada awalnya hanya dilayani oleh imam diosesan. Memasuki milenium ketiga, satu wilayah gerejawi itu telah berkembang menjadi 34 keuskupan. Berdasarkan Statistik Gereja Katolik di Indonesia per 31 Desember 1994, jumlah tenaga imam, bruder, suster ada 2.213 orang,² dan lebih dari 95% adalah orang-orang asli Indonesia. Secara sepintas perkembangan ini tentu amat menggembarakan. Benih kecil yang ditabur itu kini menampakkan buah-buah yang lebat melimpah.

Pada akhir milenium kedua dan di dalam memasuki milenium ketiga, ada suatu gejala mengkhawatirkan yang terjadi di Indonesia. Bukan hanya krisis ekonomi dan politik, kehidupan bersama turut terancam, rasa hormat akan perbedaan luntur, dan hormat akan nilai kehidupan seakan tidak ada. Di banyak tempat terjadi konflik antarsuku, agama, dan kelas sosial. Api membakar banyak tempat tinggal, percikan darah menjadi pemandangan yang normal untuk beberapa tempat. Gereja Katolik Indonesia adalah bagian yang tidak terpisahkan dari wajah masyarakat Indonesia yang demikian itu.

Tulisan ini akan mencoba untuk menggarisbawahi bukan hanya bagaimana Gereja Katolik telah berhasil masuk dan menjadi bagian integral dari masyarakat Indonesia melainkan juga mempertanyakan secara kritis apakah Gereja Katolik memang berusaha mentransformasi diri menjadi Kabar Gembira sebagaimana dikehendaki oleh Yesus Kristus, Pribadi yang menghidupi Gereja, atautkah kehadiran Gereja Katolik hanyalah menambah satu agama baru yang sama sekali tidak mewartakan suatu nilai. Perjalanan Sejarah Gereja Katolik di Indonesia sendiri akan membantu kita untuk mencari jawaban bagi pertanyaan di atas.

Misionaris sebagai Pegawai Pemerintah

Kongsi dagang Belanda, VOC (*Verenigde Oost-Indische Compagnie*) menguasai Nusantara selama dua abad, tahun 1602-1799. Selama periode tersebut, VOC tidak pernah mengeluarkan dekrit yang melarang aktivitas Gereja Katolik. Namun, dalam praktek, Gereja Katolik tidak bisa banyak bergerak. Pembatasan gerak Gereja Katolik ini merupakan perluasan dari perjanjian antara VOC dengan kerajaan Siau yang ditandatangani pada tanggal 9 November 1677.³ Dalam perjanjian itu, kehadiran Gereja Katolik memang tidak diizinkan. Larangan ini termasuk dalam bentuk barang-barang devosional seperti salib, patung, rosario. Semakin kuat dan luas kekuasaan VOC di bumi Nusantara, perjanjian lokal itu ternyata diberlakukan secara umum. Oleh karena itu, boleh dikatakan bahwa di bawah pemerintahan VOC, Gereja Katolik menjadi gerakan *clandestine*.⁴ Artinya, dari catatan-catatan yang ada tampak bahwa komunitas Katolik "menggantungkan" kegiatan rohani mereka pada kehadiran imam-imam Katolik yang kebetulan lewat atau singgah di Batavia. Kegiatan-kegiatan ini tentu tidak bersifat terbuka,

dan sangat tergantung dari posisi "pribadi" Gubernur Jenderal VOC terhadap Gereja Katolik.⁵

Dalam situasi Gereja macam demikian, sangatlah bisa dipahami kalau para misionaris memiliki program kerja yang amat sederhana, yakni menjadi tanda kehadiran Gereja Katolik. Maksudnya, karena orang-orang Katolik hanya ada di antara orang-orang Eropa, para misionaris membatasi kehadiran mereka di kota-kota dan tempat-tempat di mana ada cukup banyak orang Eropa. Selama lima puluh tahun *policy* para misionaris boleh dikatakan tidak mengalami perubahan. Jumlah mereka memang bertambah. Hanya saja, karena mereka ini menjadi pegawai pemerintah kolonial, hidup dan gaji ditanggung oleh pemerintah, gerak mereka pun sedikit banyak juga disesuaikan dengan tuntutan dan kebijakan pemerintah kolonial. Kehadiran mereka pertama-tama adalah untuk melayani kehidupan rohani orang-orang Eropa. Berkarya di antara orang-orang pribumi, atau belum terpikir oleh mereka—jumlah mereka masih jauh dari cukup untuk melayani komunitas Eropa—atau tidak sejalan dengan *policy* pemerintah.

Peluang Baru

Pada tahun 1859 terjadi perjanjian antara pemerintah Belanda dengan pemerintah Portugis yang menyangkut Pulau Flores dan sekitarnya. Singkatnya, pemerintah Portugis menyerahkan Pulau Flores kepada pemerintah Belanda dengan berbagai syarat, salah satu syarat di antaranya adalah kesediaan pemerintah Belanda untuk melengkapi pelayanan rohani penduduk Flores yang sudah memeluk iman Katolik. Bagi Gereja Katolik di Indonesia, inilah peluang baru untuk bekerja di antara penduduk pribumi.⁶ Pada periode yang sama, misionaris Yesuit mulai berkarya di Indonesia. Meski jumlah misionaris tetap amat jauh dari mencukupi tuntutan pelayanan, paling tidak para misionaris mulai mengintensifkan kemungkinan-kemungkinan kontak dengan penduduk pribumi tanpa harus melupakan pelayanan kepada komunitas katolik Eropa.

Meski relasi para misionaris dengan pemerintah kolonial lokal tidak selalu baik, lancarnya komunikasi antara Vikaris Batavia dengan Gubernur Jenderal amat membantu kelancaran karya para misionaris.⁷ Di samping baptisan, perhatian misionaris senantiasa diarahkan pada

peningkatan kesejahteraan hidup penduduk. Hal ini tampak antara lain dari usaha-usaha para misionaris untuk memulai pendidikan, memperbaiki kondisi kesehatan, pengembangan pertanian.⁸ Hasil langsung yang juga dirasakan oleh penduduk adalah terciptanya kehidupan bersama atau kehidupan bermasyarakat.

Pada akhir abad XIX para misionaris Yesuit merencanakan untuk memusatkan pelayanan di antara orang-orang Jawa. Pada periode yang sama, pemerintah kolonial juga memberi lampu hijau bagi masuknya kongregasi-kongregasi imam berkarya di Indonesia. Dalam kurun waktu kurang dari dua puluh tahun, karya di tempat-tempat yang dibuka oleh para misionaris Yesuit sudah bisa dijamin kelanjutannya oleh kongregasi-kongregasi lain. Reksa pastoral yang lebih teratur dan kontak-kontak pribadi yang lebih sering diharapkan akan semakin mengembangkan dan mendewasakan penduduk pribumi yang masih baru di dalam tradisi kekristenan. Paling tidak itulah yang diharapkan dengan adanya pembagian wilayah gerejani.

Setelah Pembagian Wilayah ...

Gereja Katolik Indonesia berkembang dengan amat baik. Pelayanan pelayanan Gereja Katolik amat dihargai dan dipuji tidak hanya oleh orang-orang Katolik sendiri, tetapi juga oleh "umat lain".⁹ Khususnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan karya-karya sosial, Gereja Katolik memiliki pengaruh yang cukup signifikan. Lewat tiga bidang pelayanan itulah orang mengenal iman Katolik, mengenal Yesus Kristus, dan kemudian memutuskan untuk menjadi anggota Gereja.¹⁰

Membaca perkembangan dan kemajuan keuskupan-keuskupan di Indonesia bisa dikatakan bahwa ketiga bidang tersebut menjadi ujung tombak atau karya andalan. Di dalam perkembangannya, ada satu catatan yang menarik untuk disimak. Karya-karya Gereja Katolik dinilai semakin elitis. Disiplin dan mutu pelayanan Gereja tidak disangkal. Sayangnya, hanya kelompok-kelompok tertentu yang bisa menikmatinya. Situasi pelayanan Gereja ini dirumuskan oleh Romo Mangunwijaya sebagai pelayanan yang *admiranda*, *non amanda* (dikagumi namun tidak dicintai).

Yang tidak kalah menarik adalah bahwa yayasan-yayasan yang dikelola oleh keuskupan banyak yang mengalami kemunduran sementara

yayasan yang ditangani oleh kongregasi-kongregasi pada umumnya mampu bertahan, dan sebagian malah mengalami perkembangan. Penelitian lebih lanjut masih diperlukan untuk bisa sampai pada satu kesimpulan yang sah. Secara sepintas, pernyataan Romo Mangunwijaya memang ada benarnya. Sebab, usaha untuk mempertahankan kualitas pelayanan memang menuntut biaya tinggi, dan pada gilirannya biaya tersebut tentu diharapkan datang dari para pengguna jasa. Muaranya adalah bahwa hanya mereka yang sanggup memenuhi tuntutan itu pulalah yang mendapat pelayanan. Sekali lagi, kesimpulan sederhana ini masih menuntut penelitian.

Kualitas pelayanan mengandaikan juga kelengkapan sarana yang juga mengandaikan ketersediaan dana dan sumber daya manusia. Prasyarat-prasyarat ini lebih mudah terpenuhi di perkotaan daripada di pedesaan, di kota-kota besar daripada di kota-kota kecil. Cukup menarik memperhatikan bagaimana pelayanan-pelayanan Gereja yang di kota-kota besar mampu bertahan, berkembang, dan mampu berkompetisi dengan pelayanan-pelayanan pemerintah. Yang paling mencolok dalam hal ini adalah pelayanan pendidikan.¹¹

Tulisan-tulisan dari *Bercermin pada Wajah-wajah Keuskupan*¹² memperkuat kesan di atas. Untuk keuskupan-keuskupan di Jawa, mundurnya yayasan-yayasan keuskupan dalam arti tertentu tidak terlalu memunculkan rasa keprihatinan di sementara umat dan pimpinan jemaat, termasuk para pastor, karena diimbangi dengan semakin berkibarnya yayasan-yayasan Katolik lainnya. Tidak demikian halnya suasana yang dihadapi oleh provinsi-provinsi gerejawi di luar Jawa, seperti Kalimantan dan Irian Jaya.

Suara Konsili Vatikan II

Dokumen-dokumen Konsili Vatikan II dan dokumen FABC (*Federation of Asian Bishops' Conferences* = Federasi Konferensi-Konferensi Para Uskup Asia) mendorong Gereja untuk semakin menghargai budaya setempat, menghormati martabat manusia, menghormati pluralitas agama, dan yang tidak kalah penting adalah berpihak kepada yang miskin, tertindas, dan tidak bersuara, *the voiceless*. Dengan lain kata, tambahannya jumlah baptisan bukan lagi menjadi fokus perhatian dari pelayanan Gereja. Oleh karena itu, kalau pokok-pokok arahan Gereja

tersebut memang menjadi tugas perutusan dan panggilan Gereja di milenium baru ini, kiranya butir-butir itu pulalah yang dapat dipakai sebagai tolok ukur bagi *plausibilitas* Gereja Katolik di Indonesia. Tulisan para uskup, atau mereka yang diberi wewenang untuk menuliskan perjalanan sejarah keuskupan masing-masing, bisa dijadikan cermin pelaksanaan keputusan Konsili Vatikan II.

Pemberdayaan dan Keterlibatan Aktif Umat

Konsili Vatikan II mengacu pada Gereja perdana di dalam usahanya untuk memperlihatkan peranan awam di dalam Gereja (AA 1). Dengan itu, Gereja sekaligus mau mengingatkan diri bahwa sudah sewajarnya kalau kaum awam semakin berperan dan terlibat aktif di dalam kehidupan Gereja.

Sejarah Gereja Katolik di Indonesia—sebagaimana dituturkan secara beragam dalam buku *Bercermin pada Wajah-wajah Keuskupan*—tidak bisa dipisahkan dari peran kaum awam. Amat mengherankan bahwa di dalam perjalanan waktu yang berkembang di sebagian keuskupan justru wajah Gereja yang "pastor sentris".¹³ Juga cukup memprihatinkan bahwa yayasan-yayasan Katolik yang dikelola oleh awam sangat sedikit. Dalam hal itu, Keuskupan Agung Semarang yang sering dipakai sebagai titik acuan juga belum menampakkan gerak yang berarti. Bahkan, ada beberapa contoh bahwa demi kelanjutan hidup, suatu yayasan Katolik awam terpaksa dialihkan kepemilikannya atau ke keuskupan atau ke suatu kongregasi.

Gerakan baru yang meniupkan angin segar terjadi di wilayah Yogyakarta. Yayasan Kanisius—sebuah yayasan keuskupan yang pengelolannya dipercayakan kepada Serikat Yesus—pernah memiliki peran sentral dalam kehidupan Gereja Katolik di Keuskupan Agung Semarang; khususnya lewat sekolah-sekolahnya yang tersebar sampai ke pelosok-pelosok desa terpencil. Lima belas tahun terakhir, yayasan yang menghasilkan tokoh-tokoh besar dalam perjalanan Gereja di Indonesia itu mengalami krisis besar karena masalah finansial. Penutupan sekolah yayasan terjadi di mana-mana. Padahal, untuk kebanyakan paroki, itu-lah satu-satunya bentuk pelayanan Gereja kepada masyarakat. Untuk paroki perkotaan, yayasan Katolik lain sudah hadir. Di paroki-paroki desa? Tinggal menunggu lonceng kematian.

Di tengah-tengah kebijaksanaan yayasan yang cenderung untuk terus menutup sekolah-sekolahnya, pimpinan yayasan setempat mendekati umat dan para pastor paroki minta dukungan dan sumbangan. Berbagai bentuk kegiatan dan promosi dilakukan yang pada intinya mengarah pada satu tujuan: menggugah kesadaran umat untuk turut aktif terlibat bagi kelangsungan sekolah Katolik, termasuk di dalamnya dukungan finansial. Tanggapan umat ternyata luar biasa. Pertanyaan yang mendasar sebenarnya lebih dialamatkan kepada para pastor paroki: apakah para pastor mau memasukkan bidang pendidikan sebagai bagian integral dari pelayanan dan termasuk keprihatinan paroki?

Pengungsi Lokal

Ancaman disintegrasi bangsa Indonesia bukanlah sebuah strategi politis untuk menakut-nakuti. Kemungkinan adanya disintegrasi adalah realitas sosial yang didasari atas kesadaran dan kerinduan untuk mempertahankan identitas dan keunikan di tengah-tengah budaya dunia yang semakin mengglobal, apalagi untuk daerah-daerah di Indonesia yang bertahun-tahun dipaksa untuk hidup seragam dan tidak pernah diberi peluang untuk memperlihatkan potensinya. Sentralisme dan usaha-usaha penyeragaman dipandang sebagai bentuk penjajahan ekonomi-budaya. Otonomi daerah sudah digelindingkan, tidak mungkin ditarik kembali. Hanya saja, pemutlakan otonomi daerah bisa menciptakan bahaya munculnya fanatisme kedaerahan dan eksklusivisme.¹⁴

Konflik-konflik komunal, seperti yang terjadi di Ambon, Poso, dan Kalimantan, atau konflik regional seperti di Aceh dan di Irian Jaya, mau tidak mau melahirkan keprihatinan mendalam pada orang yang memiliki rasa kemanusiaan. Entah apa pun motif utama dari konflik-konflik tersebut, yang jelas adalah bahwa masyarakat Indonesia dihadapkan pada persoalan baru yang muncul dari konflik-konflik tersebut, yaitu masalah pengungsi. Pada tanggal 15 Juni 2000, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Ir. Al Hilal Hamdi, mengatakan bahwa di Indonesia terdapat 785.000 pengungsi lokal atau *IDPs (Internally Displaced Persons)*. Pada bulan Juni 2001, jumlah itu diperkirakan meningkat menjadi lebih dari 1.000.000 pengungsi lokal, dan sekitar 100.000 orang Timor Timur mengungsi di Timor Barat.¹⁵

Kecuali di Aceh, Gereja Katolik berhadapan langsung dengan persoalan pengungsi tersebut. Lembaga-lembaga sosial karitatif, LSM-LSM baik yang bertaraf nasional maupun yang internasional mungkin bisa membantu menangani persoalan pengungsi ini. Namun, masalah pengungsi hanyalah letupan dari persoalan yang jauh lebih mendasar karena menyangkut persoalan hidup bersama antara penduduk asli lokal dan kelompok pendatang. Dengan lain kata, di balik konflik-konflik tersebut ada persoalan budaya. Persoalan ini sudah terpendam lama, dan oleh karena itu penanganannya juga menuntut waktu yang tidak singkat. Diperlukan suatu daya tahan, kesabaran, dan usaha-usaha yang berkesinambungan.

Gereja Katolik di Indonesia yang begitu giat berinkulturasi mendapat tantangan yang begitu konkret dari konflik-konflik ini. Gereja tidak boleh berpuas diri hanya karena telah berhasil mengangkat kekayaan budaya dan lagu-lagu daerah ke dalam perayaan-perayaan liturgi, tidak boleh berpuas diri karena jumlah tenaga pastoral yang terus bertambah, tidak boleh berbangga diri hanya karena telah berhasil mengutus tenaga misioner ke luar negeri atau ke keuskupan lain, atau karena ada cukup banyak orang Katolik mempunyai kedudukan di pemerintah daerah. Munculnya semangat sukuisme yang mengarah kepada eksklusivisme dan permusuhan terhadap kehadiran suku asing menjadi tantangan mendesak bagi Gereja Katolik. Gereja tidaklah bermaksud atau berpretensi untuk menyelesaikan segala persoalan. Akan tetapi, adanya konflik di daerah-daerah tersebut sudah cukup menjadi bahan pertanyaan tentang peran dan kehadiran Gereja di tengah-tengah masyarakat tersebut.

Dialog Antar-Agama

Karl Rahner berpendapat bahwa kesediaan Gereja Katolik untuk menghormati budaya dan agama-agama lain sebagai yang bisa menjadi sarana pewahyuan Allah merupakan salah satu hasil revolusioner dari Konsili Vatikan II. Kalau pewartaan keselamatan yang ditawarkan oleh Gereja Katolik ingin tetap relevan bagi dunia modern, tidak bisa tidak Gereja Katolik memang harus membuka diri pada realitas dunia. Sebab, keselamatan yang ditawarkan oleh Yesus Kristus memang dialamatkan kepada semua orang. Konsekuensinya, Gereja harus memperbarui

pahamnya tentang dunia. Dunia itu lebih luas dari dunia Kristen, apalagi dunia Barat.

Konsili Vatikan II sekaligus melihat bahwa dunia ini tidak hanya terdiri dari beragam budaya dan ideologi, tetapi juga berbagai agama dengan para pemeluknya. Pemeluk agama Kristen hanyalah sebagian saja dari manusia yang mencari keselamatan. Mereka juga meyakini bahwa agama yang mereka peluk itu akan membawa mereka kepada keselamatan sejauh mereka mengikuti kaidah dan ajaran-ajarannya. Oleh karena itu, Gereja Katolik harus memperbarui cara berpikir dan relasinya dengan para pemeluk agama lain. Pembaruan diri ini tidak didasari oleh pandangan politik atau strategi tertentu melainkan sebagai kelanjutan dari teologi inkarnasi, merupakan kesadaran baru Gereja Katolik di dalam mewujudkan imannya kepada Allah Bapa, yang lewat Putra-Nya mau menawarkan keselamatan kepada dunia.

Baru dalam Konsili Vatikan II secara eksplisit Gereja menganjurkan dibangunnya budaya dialog. Oleh karena itu, dialog antaragama merupakan suatu budaya yang masih baru, baik bagi Gereja Katolik maupun bagi para pemeluk agama lain. Bagi suatu tradisi agama, periode 35 tahun, dihitung dari Konsili Vatikan II, belumlah waktu yang masak. Gereja Katolik masih harus belajar, masih harus mencari pola dan bentuk yang paling baik agar dialog tersebut membawa hasil yang bermanfaat bagi umat manusia yang bersama-sama merindukan keselamatan. Dengan para pemeluk agama lain, dengan semua orang yang berkehendak baik, Gereja Katolik mau membangun kerja sama.

Indonesia merupakan sebuah negara yang unik. Artinya, di Indonesia terdapat ribuan pulau dengan budaya dan agama yang beragam pula. *The Founding Fathers* dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini dengan optimis melihat bahwa keberagaman tersebut merupakan kekayaan yang patut dibanggakan dan bukannya menjadi rintangan untuk hidup bersama dalam kesatuan negara. Mereka menciptakan Pancasila sebagai dasar negara; sebuah penggalian yang jenius, bijak, dan berjiwa inklusif. Semua warga negara, siapa pun dia dan apa pun latar belakangnya dipandang sama karena sama-sama makhluk Tuhan. Oleh karena itu, Gereja Katolik di Indonesia dapat memanfaatkan Pancasila sebagai titik awal dialog.

Adanya konflik-konflik di berbagai tempat mungkin bisa menjadi penghambat bagi terjadinya dialog, atau bahkan orang mempertanyakan

manfaat dari dialog itu sendiri. Dalam situasi demikian, yang kiranya baik diingat adalah bahwa tuntutan dialog bukanlah berdasar pada pertimbangan politis atau keamanan. Bagi Gereja Katolik, dialog adalah tuntutan perwujudan iman di tengah dunia yang semakin plural. Dialog harus dibuat kalau menginginkan bahwa iman itu tetap relevan. Dialog adalah batu ujian bagi perutusan Gereja: apakah Gereja bisa bertahan setia pada panggilan iman di tengah-tengah situasi dan suasana sosial-politik yang tidak selalu mendukung.

Preferential Option for the Poor

Konsili Vatikan II tidak secara eksplisit berbicara mengenai kehadiran orang-orang miskin dalam Gereja. *Gaudium et Spes*, sebagai misal, sekaligus menyebut panggilan dan tugas Gereja di tengah-tengah dunia yang mengalami perubahan ini (*lih.* GS 4 dan 6). Secara khusus, GS 8 dan 9 menyebut adanya pertentangan antara yang kaya dan yang kekurangan, yang bisa menimbulkan konflik dan rasa tidak saling percaya. Ke tengah-tengah situasi semacam inilah Gereja Katolik diutus dan ikut ambil bagian dalam masalah-masalah itu.

Pidato-pidato Paus Yohanes Paulus II dan suara Gereja-Gereja di Amerika Latin¹⁶ menonjolkan kehadiran dengan jelas kelompok miskin, tertindas, dan tak bersuara di tengah-tengah euforia perkembangan teknik ini. Sekadar sebuah ilustrasi, ada sementara negara yang terus-menerus mengembangkan teknik pemusnah musuh, yakni kecanggihan persenjataan. Di lain pihak, tidak sedikit negara yang masih harus menanggung beban utang; untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan dari warganya saja negara-negara ini belum mampu mandiri.

Panggilan untuk mendahulukan orang-orang miskin, yakni *preferential option for the poor*, berulang kali dan secara eksplisit disebut oleh Federasi Konferensi-Konferensi Para Uskup Asia (FABC). Kemiskinan memang menjadi salah satu ciri dari masyarakat Asia. Ada berbagai macam sebab dari kemiskinan itu. Namun, apa pun alasannya, Gereja Katolik di Asia diutus untuk mengadakan dialog dengan soal-soal ini. Untuk Gereja Katolik di Asia, kemiskinan adalah realitas konkret dan sekaligus tantangan yang menuntut jawaban konkret pula. Komitmen Gereja terhadap persoalan kemiskinan merupakan tolok ukur apakah Gereja benar-benar setia mengemban amanat Kristus.

Kemiskinan di Indonesia tampak dalam pelbagai wajah, antara lain pada *Internally Displaced People* atau pengungsi dalam negeri, pada kaum buruh, pada para penganggur. Kaum buruh yang terus-menerus resah dan gelisah untuk mendapatkan kepastian jaminan hidup bisa dimasukkan ke dalam kategori "miskin" sebab posisi mereka untuk tawar-menawar masih amat lemah. Para penganggur jelas masuk kelompok miskin. Kebanyakan dari mereka ini adalah yang tidak mampu bersaing memperebutkan lapangan kerja yang memang amat terbatas karena latar belakang pendidikan atau ekonomi. Dan lagi, sebagian besar dari mereka adalah kaum muda. Gereja tentu tidak dituntut untuk mengambil wewenang negara. Hanya saja, di tengah bangsa Indonesia yang sedang mengalami krisis dan berada di dalam suasana transisi demokrasi ini, lebih daripada di masa-masa sebelumnya, peran aktif dan inisiatif Gereja sangat dibutuhkan. Kalau masa depan Gereja dan negara ada di tangan generasi muda, bagaimana Gereja memberi perhatian kepada kaum muda dengan segala persoalannya adalah sebuah keharusan?¹⁷

Penutup

Relevansi pewartaan Gereja tidak sama dengan menyesuaikan diri dengan semangat dunia. Sebab, Gereja memang diutus untuk hadir di tengah-tengah dunia, namun Gereja bukanlah berasal dari dunia (*bdk.* Yoh 17:1-26). Benar bahwa Gereja harus mengenal apa yang bergerak di dalam dunia. Tujuannya adalah agar bisa menangkap tugas perutusan yang dipercayakan, agar Gereja bisa setia, dan pada akhirnya bisa bertindak sesuai dengan misinya yang utama. Bisa jadi, pilihannya tidak "membawa damai", tetapi "menimbulkan pertentangan". Keprihatinan yang disuarakan oleh Gereja universal dan Gereja Asia bisa membantu Gereja di Indonesia untuk menangkap dengan lebih baik dan lebih konkret lagi pelayanan macam apa yang diharapkan. Pilihan prioritas pelayanan Gereja tidaklah didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan sosial, politik, dan ekonomi, tetapi terutama dan hanya berdasar atas panggilan iman.

CATATAN

- 1 Di dalam dokumen resmi dari Takhta Suci pada tahun 1826, tidak disebut Hindia Belanda tetapi ditulis "dominium Belgicum". Hal ini bisa diinterpretasikan dengan pemahaman berikut. Pada waktu itu negara Belgia dan Belanda memang merupakan satu kerajaan. Sebagian besar dari penduduk Belgia itu menganut agama Katolik, sementara di bagian Belanda mayoritas adalah Calvinis. Karena dokumen itu adalah dokumen Takhta Suci, bagi dunia Katolik lebih masuk akal kalau menyebut Belgia.
- 2 Lih. Buku *Petunjuk Gereja Katolik Indonesia 1997*, hlm. 1.
- 3 Lih. J.E. Heeres and F.W. Stapel (eds.), *Corpus Diplomaticum Neerlandico-Indicum. Verzameling van politieke contracten en verdere verdragen, enz.*, III, 's.Gravenhage, 1955, hlm. 93-98.
- 4 Istilah *clandestine* sendiri berarti rahasia. Di abad modern, pemakaian istilah ini secara populer dan umum berlaku untuk Gereja-Gereja di bawah pemerintahan komunis di Eropa Timur sampai dengan terjadinya perubahan politik yang memuncak dengan apa yang disebut runtuhnya Tembok Berlin.
- 5 Lih. J.J.Th. Wijnhoven, "List of Roman Catholic Priests in Batavia at the Time of the V.O.C", *Nieuw Tijdschrift voor Missiewetenschap* 30(1974)16. Posisi "pribadi" yang dimaksud di sini adalah pandangan Gubernur Jenderal yang bersangkutan terhadap Gereja Katolik. Posisi ini sangat menentukan kebebasan bergerak "para imam" yang lewat Batavia.
- 6 Mgr. Vrancken, Vikaris Apostolik Batavia (tahun 1847-1874), mengatakan bahwa sulitnya menarik para misionaris Belanda untuk berkarya di Hindia Belanda antara lain karena tidak diizinkan berkarya di antara penduduk pribumi.
- 7 Perlu dicatat bahwa Vikaris Apostolik Batavia sebelum Mgr. Vrancken, yakni Mgr. Grooff, dideportasi oleh Gubernur Jenderal justru karena tidak adanya relasi yang baik. Tidak mengherankan kalau kehati-hatian Mgr. Vrancken dalam berelasi dengan pemerintahan kolonial sering dinilai berlebihan.
- 8 Surat-surat para misionaris Yesuit yang dikirim kepada Pater Provinsial di Belanda memperlihatkan usaha-usaha ini, sementara laporan tahunan para Vikaris Apostolik, sebagai misal Mgr. Claessens, melukiskan kemajuan-kemajuan yang dicapai baik dari segi gerejawi maupun transportasi.
- 9 Istilah ini diintrodusir oleh Jacques Dupuis untuk menggantikan pemakaian istilah umat non-Kristen. Alasannya adalah bahwa "non-Kristen" mengandaikan "Kristen" sebagai satu-satunya titik acuan di dalam hidup beragama.
- 10 Pernyataan ini disimpulkan dari surat-surat para misionaris yang dituliskan di dalam majalah misi, *Claverbond*. Bisa juga ditemukan di dalam beberapa karangan yang terkumpul di dalam A. Budi Susanto (ed.), *Harta dan Surga. Peziarahan Jesuit dalam Gereja dan Bangsa Indonesia modern*, Yogyakarta, Kanisius, 1990.
- 11 Laporan-laporan hasil Ebtanas yang ditulis oleh surat kabar-surat kabar memperkuat pernyataan ini: hasil-hasil terbaik di daerah-daerah didominasi Sekolah Negeri, sementara di kota-kota besar, Jakarta sebagai contoh, justru Sekolah Kristen yang mendominasi.

- 12 Fl. Hasto Rosariyanto (ed.), *Bercermin-pada Wajah-wajah Keuskupan*, Yogyakarta, Kanisius, 2001.
- 13 Sekadar catatan kecil: Mengapa di katalog-katalog keuskupan tidak dicantumkan pula alamat-alamat dari yayasan Katolik yang bukan milik keuskupan atau milik suatu tarekat?
- 14 Secara ringkas dan sederhana topik ini dibahas oleh Asvi Warman Adam dalam artikel "Ancaman Disintegrasi di Depan Mata", *Kompas* 16 Agustus 2001, hlm. 37.
- 15 Informasi ini diambilkan dari laporan JRS (*Jesuit Refugee Service*) Indonesia. Laporan JRS itu sendiri bersumber pada SATKORLAK PBP respective provinces, WHO, 13 Juni 2001.
- 16 Perhatian Bapa Suci terhadap mereka "yang miskin" terungkap paling vokal di dalam pernyataan-pernyataannya menentang embargo ekonomi terhadap Irak sementara negara-negara kuat justru mendukung embargo itu. Dari sudut pandangan politik, bisa jadi pernyataannya tidak menguntungkan. Justru karena itulah pernyataan Bapa Suci merupakan sebetuk perhatian yang tulus. Konferensi Uskup-Uskup Amerika Latin secara eksplisit dan tegas menyuarakan *preferential option for the poor* orang miskin pada Konferensi-Konferensi Sinode Medellin (Kolumbia) dan Puebla (Meksiko).
- 17 FABC secara khusus membicarakan perhatian mereka kepada kaum muda dalam salah satu pertemuan para uskup di Filipina pada tanggal 12-18 Juli 1994. Dalam pertemuan itu, para uskup menyusun pernyataan akhir dengan tajuk "Mendampingi Kaum Muda dalam Perjalanan Hidup Beriman Mereka".